



**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKP DESA)  
TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN PACE  
DESA MLANDANGAN  
Jalan Apokat no. 02**

**PERDES NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
(RKP DESA) TAHUN 2023**



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN PACE  
DESA MLANDANGAN**

*Handwritten signature in blue ink, likely of the official responsible for the document.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023. Sebagaimana kita ketahui bahwa “Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat”. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2023.....	1
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2023.....	I-1
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>I-1</b>
1.1. Latar Belakang.....	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	I-3
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa.....	I-3
<b>BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA.....</b>	<b>II-1</b>
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa.....	II-1
2.2. Kebijakan Belanja Desa.....	II-2
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa.....	II-6
<b>BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA.....</b>	<b>III-1</b>
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022.....	III-1
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022.....	III-5
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022.....	III-9
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022.....	III-12
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022.....	III-14
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022.....	III-15
<b>BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN.....</b>	<b>IV-1</b>
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023.....	IV-1
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023.....	IV-4
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>V</b>

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN PACE  
DESA MLANDANGAN

---

PERATURAN DESA MLANDANGAN  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MLANDANGAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 dengan Peraturan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6202);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2022 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Mlandangan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mlandangan Tahun 2019-2025 (Lembaran Desa Mlandangan Tahun 2019 Nomor 3).

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MLANDANGAN  
dan  
KEPALA DESA MLANDANGAN

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA TAHUN 2023.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Mlandangan.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Mlandangan dibantu Perangkat Desa Mlandangan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Mlandangan.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Mlandangan.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Mlandangan.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Mlandangan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

### BAB II SISTEMATIKA RKP DESA

#### Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
  - a. BAB I : PENDAHULUAN
    - 1.1. Latar Belakang

- 1.2. Dasar Hukum
  - 1.3. Maksud dan Tujuan
  - 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa
- b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
  - 2.2. Kebijakan Belanja Desa
  - 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
- c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA
- 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022
  - 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022
  - 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022
  - 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022
  - 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022
  - 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022
- d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023
  - 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023
- e. BAB V : PENUTUP
- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III  
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mlandangan.

Ditetapkan di Mlandangan  
pada tanggal 26 September 2022

KEPALA DESA MLANDANGAN,



Diundangkan di Mlandangan  
pada tanggal 27 September 2022

SEKRETARIS DESA MLANDANGAN,

DIMAS GRENDY SETYAWAN

LEMBARAN DESA MLANDANGAN TAHUN 2022 NOMOR 3

LAMPIRAN

PERATURAN DESA MLANDANGAN

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota. Desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, sehingga desa diharuskan menyusun RKP Desa.

RKP Desa memuat rencana Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang digunakan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran berkenaan.

Penyusunan RKP Desa dimaksudkan agar pembangunan dapat berjalan dengan lebih terarah, runtut, efektif dan efisien. Sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan sesuai prioritas kebutuhan Desa. Selanjutnya masyarakat akan lebih termotivasi dan atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di Desa, termasuk dalam hal

pelaksanaan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk Desa.

## 1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2022;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
20. Peraturan Desa Mlandangan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Mlandangan Tahun 2019-2025 ;

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKP Desa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. sebagai dokumen perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Desa
- b. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- c. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- d. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan supra desa

### 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Mlandangan ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Mlandangan serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKP Desa Tahun 2023 menjadi landasan penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2023. Kegiatan yang akan dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2023 harus memiliki dasar perencanaan kegiatan dalam RKP Desa Tahun 2023, sehingga terwujud konsistensi antara penganggaran (APB Desa) dengan perencanaan (RKP Desa).

## BAB II

### GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APB Desa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APB Desa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

#### 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2023 sebesar Rp.2.094.000.170 (Dua Milyar Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
4.	Pendapatan			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	516.700.000	516.700.000	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa			
4.1.2.	Hasil Aset			
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
4.2.	Transfer	1.561.324.170	1.577.300.170	
4.2.1.	Dana Desa	1.074.024.000	1.090.000.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	49.946.170	49.946.170	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	437.354.000	437.354.000	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten			
4.3.	Pendapatan Lain-lain	7.091.949		
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan			
4.3.6.	Bunga Bank			
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah	7.091.949		
	JUMLAH PENDAPATAN	2.085.116.119	2.094.000.170	

## 2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2023 Proyeksi Belanja Desa Mlandangan sebesar Rp.2.094.000.170 (Dua Milyar Sembilan Puluh Empat Juta Seratus Tujuh Puluh Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
5.	Belanja			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
5.1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.000	33.972.000	
5.1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	241.429.200	241.429.200	
5.1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.257.120	17.484.000	
5.1.1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	37.038.580	43.088.900	
5.1.1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000	18.900.000	
5.1.1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.912.500	3.196.300	
5.1.1.07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	54.000.000	54.000.000	
5.1.1.90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	492.000.000	492.000.000	
5.1.2.01	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	0	0	
5.1.2.02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	24.973.085	24.973.085	
5.1.2.03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	0	0	
5.1.3.01	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	219.325	4.427.600	
5.1.3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	6.226.600	1.831.600	
5.1.3.03	Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	500.000	700.000	
5.1.3.05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.460.000	4.460.000	
5.1.4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1.200.000	3.600.000	

5.1.4.02	Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rebug desa Non Reguler)	4.600.000	4.600.000	
5.1.4.03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.319.400	7.646.600	
5.1.4.04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.953.300	5.253.300	
5.1.4.05	Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	300.000	800.000	
5.1.4.07	Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.352.600	4.652.600	
5.1.4.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	13.712.000	11.727.600	
5.1.4.90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa	0	0	
5.1.4.91	Forum Pembina Desa	6.150.000	6.150.000	
5.1.5.06	Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18.981.160	18.181.160	
5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
5.2.1.01	Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	37.000.000	37.000.000	
5.2.1.05	Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	0	15.000.000	
5.2.2.01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	3.160.000	3.300.000	
5.2.2.02	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	76.494.000	88.147.000	
5.2.2.03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	0	6.930.000	
5.2.2.04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	81.500.000	7.325.000	
5.2.3.02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	0	0	
5.2.3.03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	0	20.000.000	
5.2.3.04	Pemeliharaan Jembatan Desa	0	20.000.000	
5.2.3.07	Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/Petilasan Milik Desa	1.200.000	51.200.000	
5.2.3.11	"Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan	0	29.000.000	
5.2.3.12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	150.000.000	150.000.000	
5.2.3.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	80.000.000	70.000.000	

5.2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	22.000.000	50.000.000	
5.2.3.16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	0	30.000.000	
5.2.3.99	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.000.000	12.000.000	
5.2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	30.000.000	45.000.000	
5.2.6.01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan	10.000.000	0	
5.2.6.02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.652.000	2.652.000	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa			
5.3.1.02	Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	21.600.000	21.600.000	
5.3.2.01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	6.000.000	6.000.000	
5.3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	20.200.000	20.200.000	
5.3.2.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	25.800.000	25.800.000	
5.3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.200.000	7.200.000	
5.3.4.03	Pembinaan PKK	8.481.300	8.481.300	
5.3.4.90	Pembinaan Karang Taruna	2.700.000	2.700.000	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa			
5.4.2.04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	5.000.000	17.000.000	
5.4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	0	0	
5.4.4.03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang Disabilitas)	3.300.000	3.300.000	
5.4.6.01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa)	0	0	
5.4.6.90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	0	0	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak			
5.5.1.01	Penanggulangan Bencana	15.000.000	30.000.000	
5.5.2.01	Penanganan Keadaan Darurat	7.091.949	0	
5.5.3.01	Penanganan Keadaan Mendesak	437.000.000	216.000.000	
	JUMLAH BELANJA	2.075.116.119	2.084.000.170	

### 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan; dan
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. Penyertaan Modal Desa.

#### Pembiayaan Desa Mlandangan

Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2022)	Proyeksi (2023)	
6.	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan			
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya			
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	10.000.000	10.000.000	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	10.000.000	10.000.000	

BAB III  
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2022 DAN PERMASALAHAN  
PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2022 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2022 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2022. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2022.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2022

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.000	33.972.000
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	223.231.200	241.429.200
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.317.320	25.257.120
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	57.300.065	37.038.580
05	Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000	18.900.000
06	Penyediaan Operasional BPD	3.457.600	2.912.500
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	58.500.000	54.000.000
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	492.000.000	492.000.000
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/ pemerintahan	21.000.000	0
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	20.365.550	24.973.085
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa.	0	0
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	3.000.000	219.325
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	8.568.300	6.226.600
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	2.563.000	500.000
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0	0
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.040.000	4.460.000
90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	0	0
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	2.400.000	1.200.000
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	4.600.000	4.600.000
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	4.057.500	3.319.400
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	4.559.600	4.953.300
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.400.000	300.000
06	Penyusunan Kebijakan Desa	0	0
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3.510.900	2.352.600
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	5.712.000	13.712.000
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa	0	0
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	0	0
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa	0	0
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	0	0
91	Forum Pembina Desa	6.150.000	6.150.000
1.5	Sub Bidang Pertanahan		
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	0	0

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
02	Administrasi Pertanahan	0	0
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	0	0
04	Mediasi Konflik Pertanahan	0	0
05	Penyuluhan Pertanahan	0	0
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15.755.885	18.981.160
07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)	0	0
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa	0	0

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 23 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 22 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 95%.

2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.972.000	19.817.000	Belum Tercapai
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	241.429.200	140.833.700	Belum Tercapai
3.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	25.257.120	18.081.560	Belum Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai
4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	37.038.580	21.761.400	Belum Tercapai
5.	Penyediaan Tunjangan BPD	18.900.000	11.025.000	Belum Tercapai
6.	Penyediaan Operasional BPD	2.912.500	1.560.000	Belum Tercapai
7.	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	54.000.000	18.000.000	Belum Tercapai
8.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	492.000.000	0	Tidak Tercapai
9.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	24.973.085	0	Tidak Tercapai
10.	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	219.325	219.325	Tercapai
11.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	6.226.600	0	Tidak Tercapai
12.	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	500.000	500.000	Tercapai
13.	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	4.460.000	0	Tidak Tercapai
14.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	1.200.000	600.000	Belum Tercapai
15.	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	4.600.000	1.800.000	Belum Tercapai
16.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	3.319.400	979.000	Belum Tercapai
17.	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	4.953.300	4.155.700	Belum Tercapai
18.	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	300.000	0	Tidak Tercapai
19.	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2.352.600	650.000	Belim Tercapai
20.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	13.712.000	5.712.000	Belum Tercapai
21.	Forum Pembina Desa	6.150.000	4.150.000	Belum Tercapai
22.	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	18.981.160	18.981.160	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 3 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 5 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 14 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2022

1). Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
2.1	Sub Bidang Pendidikan		
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	37.000.000	37.000.000
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	0	0
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	0	0
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa	0	0
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	0	0
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	0	0
07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**	0	0
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	0	0
09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar	0	0
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan	0	0
2.2	Sub Bidang Kesehatan		
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	4.460.000	3.160.000
02	Penyelenggaraan Posyandu	80.754.000	76.494.000
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan		
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	254.000.000	81.500.000
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa	0	0
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	0	0
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional	0	0
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	0	0
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	0	0

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan	0	0
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0	0
01	Pemeliharaan Jalan Desa	0	0
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	60.000.000	0
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	0	0
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	0	0
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	0	0
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	0	0
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	13.200.000	1.200.000
08	Pemeliharaan Embung Milik Desa	0	0
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	0	0
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	0	0
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	19.238.500	0
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	191.154.800	150.000.000
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	150.000.000	80.000.000
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	20.000.000	22.000.000
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	0	0
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	80.000.000	0
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa	0	0
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	0	0
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa	0	0
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.000.000	10.000.000
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman		
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	45.000.000	30.000.000
02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa	0	0
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	0	0
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	0	0

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman	0	0
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	0	0
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	0	0
08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah	0	0
09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa	0	0
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan	0	0
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa	0	0
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga	0	0
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman	0	0
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum	0	0
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman	0	0
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah	0	0
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**	0	0
90	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/ MCK GAKIN	0	0
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman	0	0
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0	0
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa	0	0
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa	0	0
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Pyenyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	0	0
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika		
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	16.000.000	10.000.000
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	2.652.000	2.652.000
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	0	0
		0	0
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	0	0
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	0	0

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	0	0
2.8	Sub Bidang Pariwisata		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	0	0
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa	0	0
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata	0	0

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 15 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 12 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 80%.

## 2). Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	37.000.000	28.000.000	Belum Tercapai
2.	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	3.160.000	3.160.000	Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
3.	Penyelenggaraan Posyandu	76.494.000	44.234.000	Belum Tercapai
4.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	81.500.000	24.000.000	Belum Tercapai
5.	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	1.200.000	0	Tidak Tercapai
6.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	150.000.000	150.000.000	Tercapai
7.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa	80.000.000	80.000.000	Tercapai
8.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa	22.000.000	22.000.000	Tercapai
9.	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.000.000	10.000.000	Tercapai
10	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	30.000.000	30.000.000	Tercapai
11	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa	10.000.000	10.000.000	Tercapai
12	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	2.652.000	1.060.800	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 7 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 1 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 4 kegiatan

### 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2022

- 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	0	0
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	38.200.000	21.600.000
03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa	0	0
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	0	0
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	0	0

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin		
07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	0	0
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	10.000.000	6.000.000
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	0	0
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	21.300.000	20.200.000
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	0	0
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	30.000.000	25.800.000
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten	0	0
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa	0	0
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	0	0
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	0	0
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa	0	0
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	0	0
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
01	Pembinaan Lembaga Adat	0	0
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.700.000	7.200.000
03	Pembinaan PKK	8.561.300	7.761.300
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	0	0
90	Pembinaan Karang Taruna	3.200.000	2.700.000
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	0	0

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 7 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 7 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2022 sebanyak 100%.

2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak tercapai/ Belum Tercapai
1.	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	21.600.000	12.850.000	Belum Tercapai
2.	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	6.000.000	6.000.000	Tercapai
3.	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	20.200.000	20.200.000	Tercapai
4.	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	30.000.000	19.350.000	Belum Tercapai
5.	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	7.200.000	4.000.000	Belum Tercapai
6.	Pembinaan PKK	7.761.300	4.400.000	Belum Tercapai
7.	Pembinaan Karang Taruna	3.200.000	4.000.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 2 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 0 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 5 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2022

1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	0	0
02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	0	0
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	0	0
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa	0	0
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)	0	0
06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0	0
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	0	0
02	Peningkatan Produksi Peternakan	0	0
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	0	0
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	4.000.000	5.000.000
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*	0	0
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	0	3.000.000
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	0	9.000.000
03	Peningkatan Kapasitas BPD	0	3.000.000
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga		
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.000.000	0
02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	0	0
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	2.500.000	3.300.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	0	0

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM	0	0
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi	0	0
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0	0
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
01	Pembentukan BUM Desa	5.000.000	0
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	100.000.000	0
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa	0	0
02	Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa	0	0
03	Pengembangan Industri kecil level Desa	0	0
04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif	0	0
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	0	0

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 5 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 5 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100%.

## 2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ Belum tercapai
1.	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	5.000.000	5.000.000	Tercapai
2.	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000	0	Tidak Tercapai
3.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	9.000.000	7.500.000	Tercapai
4.	Peningkatan Kapasitas BPD	3.000.000	0	Tidak Tercapai
5.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)	3.300.000	0	Tidak Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 2 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 3 kegiatan
- c. jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 0 kegiatan

### 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2022

- 1) Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2022 terhadap RKP Desa Tahun 2022

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp)	Pagu APBDesa (Rp)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	11.000.000	15.000.000
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	20.000.000	7.091.949
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	50.000.000	437.000.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2022 sebanyak 3 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 3 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2022 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 100%.

## 2) Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai/belum tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2022 sampai dengan bulan September 2022.

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Tercapai/ Tidak Tercapai/ belum tercapai
1.	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	15.000.000	15.000.000	Tercapai
2.	Sub Bidang Keadaan Darurat	7.091.949	0	Tidak Tercapai
3.	Sub Bidang Keadaan Mendesak	437.000.000	324.000.000	Belum Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai : 1 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai : 1 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output belum tercapai : 1 kegiatan

### 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2022

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pusat. Berdasarkan hasil evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, diperoleh data permasalahan pembangunan di Desa Mlandangan sebagai berikut:

- A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
1. Keterbatasan anggaran untuk kegiatan-kegiatan di bidang pemerintahan desa;
  2. SDM dari Aparat yang kurang Kapable sehingga tidak bisa maksimal dalam kegiatan Pemerintah Desa;
  3. Pengurangan anggaran yang berdampak pada kurang maksimalnya kegiatan pemerintah desa;
  4. Tugas Pokok dan Fungsi yang kurang berjalan Maksimal.
- B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
1. Kurangnya tenaga ahli (Tukang) yang sesuai dengan jenis Kegiatan;
  2. Kurangnya partisipasi masyarakat;
  3. Kurangnya kesadaran warga untuk hidup bersih;
  4. Kurangnya sarana sanitasi dan drainase;
  5. Jalan usaha tani sebagai salah satu pendukung peningkatan ekonomi pertanian masih kurang memadai.
- C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
1. SDM tenaga keamanan masih belum terampil;
  2. Sarana dan Prasarana olah raga masih belum memadai;
  3. Peran Lembaga tingkat desa yang belum berfungsi secara maksimal;
  4. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum dan aturan-aturan yang ada.
- D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
1. Sarana irigasi sebagian besar masih non teknis;
  2. Ketersediaan pupuk pertanian yang kurang maksimal;
  3. Masih banyak warga yang tidak memiliki keterampilan/skill;
  4. Kurangnya kreatifitas masyarakat;
  5. Banyak usaha kecil yang masih sulit mengakses pinjaman untuk penambahan modal usaha
- E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
1. Banyaknya warga yang berharap dapat bantuan.

## BAB IV

### PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKP Desa Tahun 2022 dan permasalahan pembangunan di Desa Mlandangan yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2023.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023.

#### 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2023

Prioritas ini berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Kegiatan Prioritas Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
  - a. menyusun rancangan peraturan desa tentang:
    - 1) APB Desa Tahun Anggaran 2023
    - 2) Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran 2022
    - 3) RKP Desa Tahun 2024
    - 4) Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2023
  - b. Penghasilan tetap, tunjangan, honor dan insentif
    - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa
    - 2) Penyediaan Jaminan Sosial untuk Perangkat Desa
    - 3) Tunjangan BPD
    - 4) Honorarium staf desa
    - 5) Insentif ketua RT dan RW
    - 6) Honorarium Forbindes
    - 7) Insentif petugas pemungut pajak
  - c. Operasional pemerintah desa/lembaga desa
    - 1) Operasional Pemerintah desa
    - 2) Operasional BPD
    - 3) Operasional RT dan RW
    - 4) Operasional Lembaga lembaga Desa (PKK,LPM,Karang Taruna)

- d. Penyediaan sarana/aset
  - 1) Pengadaan aset perkantoran
- e. Pembangunan/pemeliharaan kantor
  - 1) Pemeliharaan kantor desa
- f. Administrasi umum dan kependudukan
  - 1) Pelayanan administrasi umum
  - 2) Pelayanan administrasi kependudukan (SEDUDO)
  - 3) Pengelolaan arsip
  - 4) Pengelolaan administrasi aset desa (SIPADES)
- g. Pendataan desa
  - 1) Penyusunan profil desa
  - 2) Pemutakhiran BDT (SIKS-NG)
  - 3) Pemutakhiran SDG'S
- h. Penyelenggaraan rembug/musdus/musdes/musrenbangdes
  - 1) Rembug stunting
  - 2) Musdus
  - 3) Musdes RKP
  - 4) Musrenbangdes RKPD dan RKP 2023
- i. Laporan dan informasi desa
  - 1) LPPD, LKPPD, IPPD
  - 2) Pemaparan APBdes
  - 3) Pengelolaan website desa
- 2. Kegiatan Prioritas Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
  - a. Pembangunan sumber daya manusia
    - 1) Dukungan kegiatan pendidikan (PAUD/TK)
    - 2) Penyelenggaraan posyandu balita
    - 3) Kelas Bumil
    - 4) Dukungan untuk guru ngaji
    - 5) Perpustakaan desa
  - b. Kesehatan dan kesejahteraan
    - 1) Penyelenggaraan polindes
    - 2) Penyelenggaraan posyandu Lansia
    - 3) Penanganan dan pencegahan pandemi
    - 4) Bantuan rehab rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin
  - c. Infrastruktur
    - 1) Pemeliharaan Jalan Lingkungan
    - 2) Pembangunan Jembatan Sawah
    - 3) TPT jalan sawah
    - 4) Pemeliharaan Penerangan Jalan

3. Kegiatan Prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
  - a. Kelembagaan
    - 1) Insentif dan operasional lembaga tingkat desa/lembaga desa
    - 2) Penguatan satlinmas
  - b. Kegiatan seni, budaya dan keagamaan
    - 1) Penyelenggaraan kegiatan keagamaan
    - 2) Pembinaan Kelompok Kesenian dan Keagamaan Desa
    - 3) Pembangunan/pemeliharaan Situs Bersejarah Desa
    - 4) Penyelenggaraan kegiatan budaya (Bersih Desa)
  - c. Kepemudaan
    - 1) Kegiatan PHBN
    - 2) Perlombaan olahraga
4. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
  - a. Pemberdayaan perempuan
    - 1) Pelatihan usaha untuk perempuan
    - 2) Pendampingan/dukungan kelompok usaha perempuan
  - b. UMKM
    - 1) Pemeliharaan Kios Desa
    - 2) Dukungan pengembangan Bumdes
5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
  - a. Kesiapan tanggap bencana
  - b. Penanganan keadaan darurat
  - c. BLT bagi warga miskin

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2023, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan
2. Pemutakhiran Data Desa (Sedudo, Data kemiskinan/ SIKS-NG, Data Aset, Prodekel, SDGs, IDM, DDC Bumdesa, SIPD, Sipades, Simanis)
3. Pendataan Konvergensi Stunting dengan Aplikasi EHDW

#### 4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2023 (Form Excel)

MATRIX RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-DESA)

TAHUN 2023

DESA : MLANDANGAN  
 KECAMATAN : PACE  
 KABUPATEN : NGANJUK  
 PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-N	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang		Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa															
1	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1; 2; 3; 18	1 orang	1 orang	Jan-Des	Mlandangan	12 bulan	Kepala Desa	33.972.000	ADD	√		
			2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1; 2; 3; 18	8 orang	9 orang	Jan-Des	Mlandangan	12 bulan	Perangkat Desa	241.429.200	ADD	√		
			3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3	11 orang	11 orang	Jan-Des	Mlandangan	12 bulan	Perangkat Desa	17.484.000	ADD	√		
			4	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	18	1 paket	1 paket	Jan-Des	Mlandangan	1 bulan	Pem,PPKD	43.088.900	ADD	√		
			5	Penyediaan Tunjangan BPD	1; 2; 3; 18	7 orang	7 orang	Jan-Des	Mlandangan	12 bulan	BPD	18.900.000	ADD	√		
			6	Penyediaan Operasional BPD	18	1 paket	1 paket	Jan-Des	Mlandangan	1 paket	BPD	3.195.300	ADD	√		
			7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	1; 2; 3; 18	45 orang	45 orang	Jan-Des	Mlandangan	12 bulan	RT & RW	54.000.000	ADD	√		
			90	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	1; 2; 3; 18	13 orang	14 orang	Jan-Des	Mlandangan	1 tahun	Kades & Perangkat	492.000.000	PAD	√		
2	2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	9	2 unit	4 unit	Okt-Des	Mlandangan	1 unit	Pemdes	29.091.925	DDS,PBH	√		
			2	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9	1 unit	1 unit	Mar-Jul	Mlandangan	1 paket	Pemdes	24.973.085	PBH	√		
3	3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	1	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	18	-	1 keg	Jan-Des	Mlandangan	1 paket	Pemdes	4.427.600	DDS	√		
			2	Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa	5,8,17	2 paket	2 paket	Jan-Des	Mlandangan	2 paket	Tim Penyusun	1.831.600	DDS	√		
			3	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa	18	-	1 keg	Jan-Des	Mlandangan	1 paket	Pemdes	700.000	PBH	√		
			5	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1; 2; 3	1 keg	1 keg	Jan-Des	Mlandangan	1 paket	Tim Penyusun	4.460.000	DDS	√		
4	4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	1	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	5; 8; 9; 10	1 keg	1 keg	Okt-Des	Mlandangan	1 paket	Pemdes	3.600.000	DDS	√		
			2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	5; 8; 9; 10	1 keg	1 keg	Jan-Des	Mlandangan	6 paket	Pemdes	4.600.000	DDS	√		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke- N	Waktu Pelaksana an	Lokasi Kegiatan (RT/RW/	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan		
	Bidang		Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelol a	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	5; 8; 9; 10	1 keg	1 keg	Mart-Sept	Mlandangan	1 paket	Tim Penyusun	7.646.600	DDS	√		
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	1; 2; 3; 10	2 keg	2 keg	Jan-Des	Mlandangan	4 paket	Pemdes	5.253.300	DDS	√		
		5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	9; 18	1 keg	1 keg	Okt-Des	Mlandangan	1 paket	operator sipades	800.000	DDS	√		
		7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	17; 18	3 keg	3 keg	Des	Mlandangan	3 paket	Pemdes	4.652.600	DDS	√		
		8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	9; 17; 18	1 paket	2 paket	Jan-Des	Mlandangan	12 bulan	Pemdes	11.727.600	DDS	√		
		91	Forum Pembina Desa	17; 18	4 orang	4 orang	Jan-Des	Mlandangan	12 bulan	Forbindes	6.150.000	ADD	√		
5	Pertanahan	6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	17; 18	1 paket	1 paket	Jul-Sept	Mlandangan	1 keg	Penarik PBB	18.181.160	PBH	√		
Jumlah Bidang 1											1.032.164.870				
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa														
1	Pendidikan	1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	4; 5	12 orang	12 orang	Jan-Des	Mlandangan	12 bulan	Guru	37.000.000	DDS	√		
5		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasa h Non- Formal Milik Desa	4; 5	1 paket	1 paket	Mei-Jun	Mlandangan	1 unit	PAUD	15.000.000	DDS	√			
2	Kesehatan	1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	3; 10	2 paket	2 paket	Jan-Des	RW. 03	12 bulan	Bidan & Masyarakat	3.300.000	DDS	√		
2		Penyelenggaraan Posyandu	3; 10	7 paket	7 paket	Mei-Jun	Mlandangan	3 unit	Kader & Masarakat	88.147.000	DDS	√			
3		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	3; 10	0 paket	3 paket	Jan-Des	Mlandangan	12 bulan	Kader & Masarakat	6.930.000	DDS	√			
4		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	3; 18	3 paket	3 paket	Okt-Mar	Mlandangan	12 bulan	Kader & Masarakat	43.325.000	DDS	√			
8		Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	3; 18	Opaket	1 paket	Mei-Jul	Mlandangan	12 bulan	Kader & Masyarakat	20.000.000	DDS	√			
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	8; 9	1 paket	1 paket	Mei-Jul	Mlandangan	250 m	Masyarakat	20.000.000	DDS	√		
4		Pemeliharaan Jembatan Milik Desa	8; 9	1 paket	1 paket	Okt-Des	Mlandangan	20 m	Masyarakat	20.000.000	DDS	√			
7		Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa	8; 9	1 paket	1 paket	Agst-Sept	Mlandangan	1 unit	Masyarakat	51.200.000	PAD,DDS	√			

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke- N	Waktu Pelaksana an	Lokasi Kegiatan (RT/RW/	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang		Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelol a	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
			11	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	8; 9	1 paket	1 paket	Agst-Sept	Mlandangan	50 m	Masyarakat	29.000.000	DDS	√		
			12	Pembangunan /Peningkatan Jalan Usaha Tani	8; 9	1 paket	1 paket	Mei-Jul	Mlandangan	250 m	Masyarakat	150.000.000	DDS	√		
			13	Pembangunan /Peningkatan Jembatan Milik Desa	8; 9	1 unit	1 unit	Agst-Sept	RT. 02 RW. 02	7 x 2 m	Masyarakat	70.000.000	DDS	√		
			14	Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa	3; 8; 9	-	1 keg	Agst-Sept	Dusun Mlandangan	40 m	Masyarakat	50.000.000	DDS	√		
			16	Pembangunan/Rehabilitasi Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan	8; 9	-	2 paket	Okt-Des	Dusun Mlandangan	100 x 2 m	Masyarakat	30.000.000	DDS	√		
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8;9	1 paket	1 paket	Jan-Des	Mlandangan	15 unit	Masyarakat	12.000.000	DDS	√		
4	Kawasan Permukiman	1		Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN	1; 6; 10	3 KK	3 KK	Agst-Sept	Dusun Mlandangan	3 unit	Warga miskin	45.000.000	DDS	√		
6	Perhubungan, Komunikasi, dan	2		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	9; 18	4 paket	4 paket	Jan-Des	Mlandangan	4 paket	Masyarakat	2.652.000	DDS	√		
Jumlah Bidang 2											693.554.000					
3	Pembinaan Kemasyarakatan Desa															
	1	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat	2	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)	1; 11; 17	31 orang	31 orang	Jan-Des	Mlandangan	12 bulan	satlinmas	21.600.000	DDS	√		
	2	Kebudayaan dan Keagamaan	1	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	5; 10	4 paket	4 paket	Jan-Des	Mlandangan	2 keg	Masyarakat	6.000.000	DDS	√		
			3	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	5; 10	2 paket	2 paket	Juli-Agst	Mlandangan	2 keg	Masyarakat	20.200.000	PAD	√		
			90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	4; 5	2 paket	2 paket	Jan-Des	Mlandangan	2 keg	Guru ngaji & hafidz/ hafidzah	25.800.000	DDS	√		

No	Bidang/ Jenis Kegiatan			Mendukung SDG's Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Prakiran Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang		Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
4	Kelembagaan Masyarakat	2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	8, 9; 17	3 paket	3 paket	Jan-Des	Mlandangan	12 bulan	LPM, KPMD	7.200.000	ADD;DD	√			
		3	Pembinaan PKK	5; 10	3 paket	3 paket	Jan-Des	Mlandangan	12 bulan	PKK	8.481.300	ADD	√			
		90	Pembinaan Karang Taruna	9; 18	-	3 paket	Jan-Des	Mlandangan	2 keg	Karang Taruna	2.700.000	ADD	√			
Jumlah Bidang 3											91.981.300					
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa															
2	Pertanian dan Peternakan	4	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	5; 10	-	100 orang	Mei-Jul	Mlandangan	2 keg	Petani	17.000.000	DDS	√			
4	Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	3	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyangang disabilitas)	5; 10	10 Orang	10 orang	Okt-Des	Mlandangan	1 keg	Perempuan	3.300.000	PAD	√			
6	Dukungan Penanaman Modal	90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal	5;10	1 keg	1 keg	Agustus	Mlandangan	1 paket	Bumdes	10.000.000	DDS	√			
Jumlah Bidang 4											30.300.000					
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa															
1	Penanggulangan Bencana	00	Penanggulangan Bencana	2; 3	80 orang	1 keg	Agst-Sept	Mlandangan	1 paket	Masyarakat	30.000.000	DDS	√			
2	Keadaan Darurat	00	Keadaan Darurat													
3	Keadaan Mendesak	00	Keadaan Mendesak.	1; 2, 3	60 orang	60 orang	Jan-Des	Mlandangan	12 bulan	Masyarakat	216.000.000	DDS	√			
Jumlah Bidang 5											246.000.000					
<b>JUMLAH TOTAL</b>											<b>2.094.000.170</b>					



Mlandangan, Tanggal 26 September 2022

Disusun oleh: <sup>6</sup>  
Tim Penyusun RKD Desa

*[Signature]*  
DIMAS GRENDY S

## BAB V

### PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

